

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RANKHIR P-RENJA)
TAHUN 2024**



DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayatnya sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir P-Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2024, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2021-2026, kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi misi. Adapun visi misi Walikota Terpilih adalah ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT BERADABAN”***.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2024 masih banyak kekurangan, namun demikian kami berharap dengan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 ini dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan kami laksanakan pada Tahun 2024.

Akhirnya atas nama Jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024.

Kepala Dinas,



M. WAHYONO HADIPUTRO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19641224 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	7
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja ...	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Samarinda	32
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.2 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Untuk APBD-P Tahun 2024	44
BAB IV : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rankhir P-Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2025 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda melakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir P- Renja) tahun 2024

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pmerntah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Negeri Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur : 64.72/I/18/2/2021);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Noor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025.
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.
31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026;
33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan
atas Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024;
38. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme
Perencanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
43. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2024.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dibuat karena terdapat Perubahan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

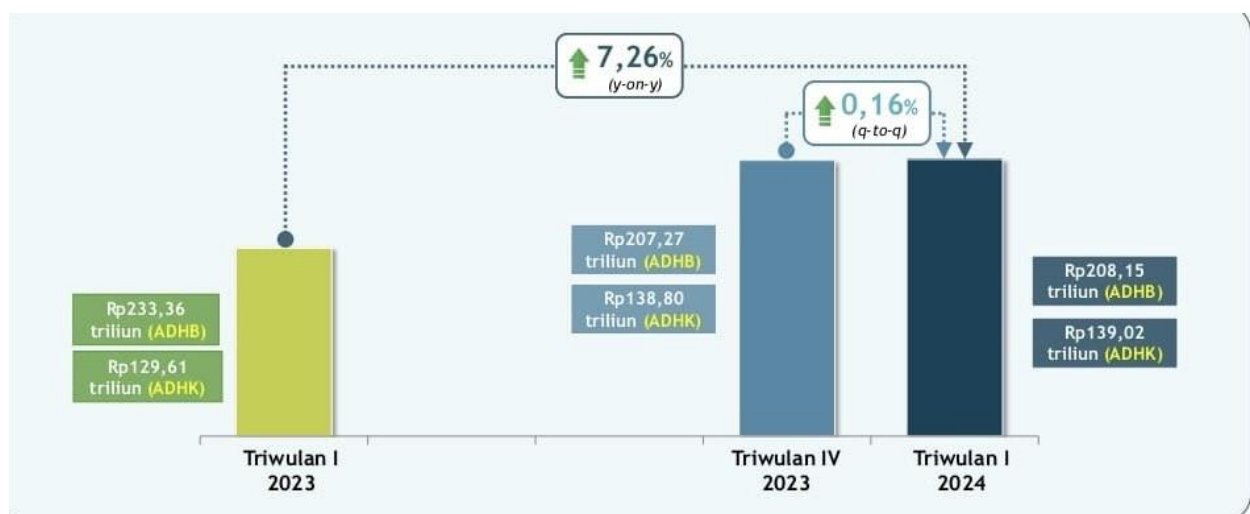
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan perkembangan dan perubahan keadaan, penyusunan perkiraan perubahan atas RKPD Tahun Anggaran 2024, apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan

1.4.1. PDRB Kota Samarinda

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 208,15 triliun, PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 139,02 triliun.

"Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 7,26 persen (y-on-y)," ucap Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS KaltimKepala Badan Pusat Statistik Kaltim Yusniar Juliana dalam keterangan resminya, Selasa (14/5).



Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,44 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,12 persen. Lanjutnya, Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,16 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,37 persen. Menurut, Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024 secara y-on-y yang positif terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Kalimantan sebesar 48,12 persen. Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024 secara y-on-y, enam belas lapangan usaha memberikan andil positif terhadap pertumbuhan kinerja ekonomi Kalimantan Timur.

Tiga lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,79 persen; kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 1,04 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,39 persen. Satu lapangan usaha memberikan andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan andil negatif sebesar 0,13 persen.

Berdasarkan PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, struktur perekonomian Kalimantan Timur belum mengalami perubahan yang berarti. Lima lapangan usaha yang mendominasi adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan dengan peranan sebesar 39,57 persen, lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,40 persen, Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,46 persen. Berikutnya Lapangan Usaha adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,51 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,79 persen.

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir P-Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat/ Menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran perubahan ekonomi daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penghapusan kekuatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah tersebut

mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BABI V. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dari capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara Umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2024 Triwulan II capaian kinerja sebesar 43,59% yang dijelaskan pada table berikut :

					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota s/d RKPD Kota Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Triwulan I		Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
											-1	-1	-2	-2						
					Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda															
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			10,764,682,221		18,308,858,584		2,642,576,682		3,864,849,272		9,542,324,388		20,307,006,609	43.59	52.12
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			53,068,000		150,000,000		0		7,345,000		33,797,500		86,865,500	75	22.53
2	7	2				Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda			1 Dokumen		0.2 5		0.50		0.75				75	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			53,068,000		150,000,000		0		7,345,000		33,797,500		86,865,500	75	22.53
2	7	2	2.01			Jumlah Dokumen			1 Dokumen		0.2 5		0.50		0.75				75	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		1	53,068,000		150,000,000		0		7345000		33,797,500		86,865,500	50	22.53
2	7	2	2.01	1		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			1 Dokumen		0		0.5		0.5				50	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			309,230,800		1,690,000,000		25,931,168		632,115,584		1,217,624,312		1,526,855,112	144	72.05
2	7	3				Jumlah peserta yang mendapatka n sertifikat kompetensi			25 Orang		6		30		36				144	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			261,878,300		1,150,000,000		22,333,668		446,166,340		935,127,568		1,197,005,868	800	81.32
2	7	3	2.01			Jumlah pelatihan			4 Pelatihan		0		32		32				800	

						yang dilaksanakan													
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		64	140,582,800	600,000,000	14505096	57946840	441,410,496	581,993,296	0	73.57				
2	7	3	2.01	1		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		48 Orang	0	0	0			0					
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		40	25,800,000	150,000,000	0	10295000	101,176,000	126,976,000	128	67.45				
2	7	3	2.01	2		Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		25 Lembaga	0	32	32			128					
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		16	95,495,500	400,000,000	7828572	377924500	392,541,072	488,036,572	165	98.14				
2	7	3	2.01	3		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaa n Sarana Pelatihan Kerja		20 Unit	0	33	33			165					
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			0	90,000,000	2,380,000	8,645,000	32,740,000	32,740,000	0	36.38				

2	7	3	2.02			Jumlah LPK swasta yang dibina			14 Lembaga		0			0			0	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		0		90,000,000		2380000		8645000		32,740,000		32,740,000	0 36.38
2	7	3	2.02	1		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			14 Lembaga		0		0				0	
2	7	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		0		300,000,000		0		104,370,304		125,255,304		125,255,304	100 41.75
2	7	3	2.03			Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap			30 Izin LPK		0		30		30			100
2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		0		300,000,000		0		104370304		125,255,304		125,255,304	100 41.75
2	7	3	2.03	1		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			30 Perizinan		0		30		30			100
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		150,000,000		1,217,500		72,933,940		124,501,440		124,501,440	50 83
2	7	3	2.05			Peningkatan Produktivitas Daerah			10 Perusahaan		0		5		5			50
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		0		150,000,000		1217500		72933940		124,501,440		124,501,440	100 83
2	7	3	2.05	1		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			5 Dokumen		0		5		5			100

2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			440,480,456		795,000,000		0		153,971,000		385,772,775		826,253,231	48.06	48.53
2	7	4				Persentase Tingkat Penganggura n			80.00 %		20		18.45		38.45				48.06	
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			289,677,256		320,000,000		0		78,328,000		193,342,000		483,019,256	53.33	60.42
2	7	4	2.01			Jumlah Pelayanan Antar Kerja			375 Orang		0		200		200				53.33	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			0		60,000,000		0		0		0		0	0	0
2	7	4	2.01	1		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatka n Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			3 Orang			0		0				0		
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja			0		20,000,000		0		0		0		0	50	0
2	7	4	2.01	2		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			60 Orang			30		30				50		
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			0		50,000,000		0		0		50,000,000		50,000,000	33.33	100
2	7	4	2.01	3		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatka n Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			900 Orang			300		300				33.33		

2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			0		80,000,000		0		6080000		57,370,000		57,370,000	100	71.71
2	7	4	2.01	4	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				16 Orang		0		16		16				100	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja		45	289,677,256		110,000,000		0		72248000		85,972,000		375,649,256	113.64	78.16
2	7	4	2.01	5	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				22 Orang		0		25		25				113.64	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			144,235,100		350,000,000		0		75,643,000		192,430,775		336,665,875	100	54.98
2	7	4	2.03		Jumlah media informasi Pasar Kerja				1 Media		0		1		1				100	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		0	71		50,000,000		0		0		50,000,000		50,071,000	100	100
2	7	4	2.03	1	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen		0		1		1				100	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		2100	16,729,100		150,000,000		0		56375000		80,687,775		97,416,875	50	53.79
2	7	4	2.03	2	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem				900 Orang				450		450				50	

						Online (Karir Hub)														
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja		172	127,435,000		150,000,000		0		19268000		61,743,000		189,178,000	16.67	41.16
2	7	4	2.03	3		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			600 Orang		0		100		100				16.67	
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			0		125,000,000		0		0		0		0	0	0
2	7	4	2.04			jumlah Tenaga kerja ditempatkan			70 Orang				0		0				0	
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			0		50,000,000		0		0		0		0	0	0
2	7	4	2.04	1		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			20 Orang				0		0				0	
2	7	4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			0		45,000,000		0		0		0		0	0	0
2	7	4	2.04	2		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani			30 Orang				0		0				0	

2	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			0	30,000,000		0		0		0		0	0	0
2	7	4	2.04	3		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		20 Orang			0		0				0		
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			254,682,570	4,915,400,000		0		77,768,715		331,285,165		585,967,735	25	6.74
2	7	5				Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		49.0 %		12.25				12.25				25	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			28,820,970	325,000,000		0		0		61,659,000		90,479,970	25	18.97
2	7	5	2.01			Kepatuhan Perusahaan Terhadap Regulasi Ketenagakerjaan			30 Perusahaan	7.5				7.5				25	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			0	100,000,000		0		0		0		0	25	0
2	7	5	2.01	1		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			30 Perusahaan	7.5				7.5				25	
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			0	100,000,000		0		0		0		0	16.67	0

2	7	5	2.01	2		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			30 Perusahaan	5				5				16.67	
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		40	28,820,970		125,000,000	0		0		61,659,000		90,479,970	25	49.33
2	7	5	2.01	3		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			40 Laporan	10				10				25	
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			225,861,600		4,590,400,000	0		77,768,715		269,626,165		495,487,765	25	5.87
2	7	5	2.02			Terwujudnya Iklim Kerja yang kondusif di Perusahaan			40 Perusahaan	10				10				25	
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		90	117,873,600		250,000,000	0		29470015		90,940,015		208,813,615	25	36.38

2	7	5	2.02	1		Jumlah Perselisihan yang Dicegah			40 Perkara		10				10				25	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		75	10,400,000		125,000,000		0		28748200		115,202,050		125,602,050	25	92.16
2	7	5	2.02	2		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			40 Perkara		10				10				25	
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			0		55,000,000		0		0		37,400,000		37,400,000	20	68
2	7	5	2.02	3		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			15 Asosiasi dan Serikat Pekerja		3				3				20	
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		3	71,087,000		300,000,000		0		7313500		13,847,100		84,934,100	50	4.62
2	7	5	2.02	4		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			2 Lembaga		1				1				50	
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		70	26,501,000		3,860,400,000		0		12237000		12,237,000		38,738,000	0	0.32
2	7	5	2.02	5		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas			70 Orang		0				0				0	

						Kesejahteraan Pekerja														
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,707,220,395		10,758,458,584		2,616,645,514		2,993,648,973		7,573,844,636		17,281,065,031	96.52	70.4
2	7	1				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90,50 Persen		87.35		0		87.35				96.52	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74,000,000		200,000,000		30,736,300		44,590,500		95,390,300		169,390,300	98.5	47.7
2	7	1	2.01			Nilai Akip			66,50 Persen		65.50		0		65.5				98.5	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	50,000,000		100,000,000		0		12227000		26,539,500		76,539,500	42.86	26.54
2	7	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen		1		2		3				42.86	
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	24,000,000		50,000,000		12318160		15544750		27,862,910		51,862,910	50	55.73
2	7	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan		0.25		0.25		0.5				50	
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		50,000,000		18418140		16818750		40,987,890		40,987,890	50	81.98

2	7	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan		0.25		0.25		0.5			50		
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,244,008,474		7,133,660,000		1,712,854,558		2,080,104,039		5,276,414,986		11,520,423,460	0	73.97
2	7	1	2.02			Jumlah Pegawai			83 Orang						0			0		
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		45	5,158,158,090		6,146,171,000		1491829558		1764507339		4,540,860,997		9,699,019,087	0	73.88
2	7	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan						0			0		
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		20	1,076,582,284		937,489,000		221025000		305700000		725,657,289		1,802,239,573	0	77.4
2	7	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14 Dokumen						0			0		
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	9,268,100		50,000,000		0		9896700		9,896,700		19,164,800	0	19.79
2	7	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan						0			0		
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0		0					0		0	0	0	

2	7	1	2.02	7		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			5 Laporan					0				0		
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		0		0		0		0		100	0	
2	7	1	2.05			Jumlah Laporan								0				100		
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0		0				0		0		100	0	
2	7	1	2.05	2		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								0				100		
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			768,197,466		766,618,500		32,772,000		284,322,780		388,671,080		1,156,868,546	8.33	50.7
2	7	1	2.06			Jumlah Laporan Penyediaan/ Pengadaan			12 Bulan			1		1				8.33		
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3	71,142,997		52,585,000		3762000		19819000		44,380,000		115,522,997	50	84.4
2	7	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket			1.5		1.5				50		
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		200,000,000		0		200000000		200,000,000		200,000,000	100	100

2	7	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket			5		5				100		
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	20,166,800		10,000,000		0		10000000		10,000,000		30,166,800	100	100
2	7	1	2.06	3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket			1		1				100		
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5	22,214,000		17,000,000		0		0		0		22,214,000	0	0
2	7	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket					0				0		
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		219.17	152,000,000		110,000,000		10850000		43070000		83,572,300		235,572,300	0	75.98
2	7	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			200 Paket					0				0		
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		18500	59,160,000		79,500,000		10800000		5322000		19,082,000		78,242,000	2	24
2	7	1	2.06	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			50 Dokumen			1		1				2		
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		15	26,582,000		27,218,000		3680000		0		10,055,000		36,637,000	0	36.94
2	7	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			15 Laporan					0				0		
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		20	416,931,669		270,315,500		3680000		6111780		21,581,780		438,513,449	0	7.98

					Konsultasi SKPD															
2	7	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan					0				0		
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	100,000,000		0		0		92,382,600		92,382,600	0	92.38		
2	7	1	2.07			Laporan rencana kebutuhan barang			1 Laporan				0					0		
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	100,000,000		0		0		92,382,600		92,382,600	0	92.38		
2	7	1	2.07	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit				0					0		
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,417,924,114	1,355,912,084		248,638,656		253,948,464		705,488,480		2,123,412,594	120	52.03		
2	7	1	2.08			Laporan Penyediaan Jasa			10 Laporan		12		12					120		
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10	3,312,000		3,329,000		0		1900000		1,900,000		5,212,000	0	57.07
2	7	1	2.08	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10 Laporan				0					0		
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	752,602,614		906,873,584		233638656		192198464		561,788,480		1,314,391,094	33.33	61.95
2	7	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,			36 Laporan			12		12					33.33	

						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15	467,009,500		250,709,500		15000000		11100000		44,300,000		511,309,500	55.56	17.67
2	7	1	2.08	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan			18 Laporan				10		10				55.56	
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		35	195,000,000		195,000,000		0		48750000		97,500,000		292,500,000	0	50
2	7	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan						0				0	
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,203,090,341		1,202,268,000		591,644,000		330,683,190		1,015,497,190		2,218,587,531	8.33	84.47
2	7	1	2.09			Laporan Pemeliharaa an			12 Laporan				1		1				8.33	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10	59,802,337		135,000,000		0		46409330		52,739,330		112,541,667	0	39.07
2	7	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			24 Unit						0				0	

						dibayarkan Pajaknya														
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		10	72,644,000	84,100,000	0	29996000	35,576,000	108,220,000	0	42.3					
2	7	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			17 Unit			0		0						
2	7	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel			0	0			0	0	0	0					
2	7	1	2.09	5		Jumlah Mebel yang Dipelihara			50 Unit			0		0						
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30	556,896,004	368,230,000	242061000	63092100	342,213,100	899,109,104	50	92.94					
2	7	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit		15	15		50						
2	7	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			0	0			0	0	0	0					
2	7	1	2.09	7		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit			0		0						
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	43,230,000	543,388,000	334838000	141866000	518,854,000	562,084,000	100	95.49					
2	7	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di			1 Unit		1	1		100						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Minimal daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan OPD dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya yang meliputi 5 aspek utama yang dijadikan tolak ukur kinerja OPD, namun semenjak tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tidak lagi menjadi pengampu SPM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Isu-isu penting dalam Renja disusun berdasarkan beberapa sumber, berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan di kota Samarinda, bersumber dari permasalahan isu dalam rangka pembangunan jangka panjang daerah Kota Samarinda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda prioritas pembangunan, dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut dapat diangkat menjadi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Dengan adanya MEA diperlukan tenaga kerja yang terampil dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Tuntutan Perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.
3. Perluasan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal agar dapat mengakomodir angkatan kerja yang terus bertambah.
4. Tingkat pemahaman dan kepatuhan perusahaan / tenaga kerja terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan Kompetensi Pencari Kerja ;

1. Kurangnya Tenaga Instruktur dan Pengembangan lembaga pelatihan yang tidak sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan;
2. Kurangnya pengembangan produktivitas pada perusahaan mikro, kecil dan menengah UMKM serta Wirausaha Baru;
3. Tingkatnya pengangguran terbuka yang cukup tinggi, ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan dan terbatasnya kesempatan kerja, tingkat pelaporan yang tidak akurat, serta banyaknya perusahaan yang tidak memahami dan menjalankan peraturan ketenagakerjaan menyebabkan banyaknya perselisihan perusahaan dan rendahnya/ kurangnya kesejahteraan pekerja, pekerja dan serikat buruh.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Samarinda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Perangkat daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2024 yang terdiri dari 5 Program, 15 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam Pembahasan Musrenbang Kota yang disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda dalam bidang Ketenagakerjaan .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Samarinda

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Umum Perangkat daerah					Administrasi Umum Perangkat daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	52585000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	52,585,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	5	150000000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	5	150,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	10000000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	10,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	27000000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	17,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	200	127000000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	200	110,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	50	79500000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	50	79,500,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	27218000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	27,218,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	270315500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	270,315,500
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Arsip dinamis yang di arsipkan	1	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Arsip dinamis yang di arsipkan		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	10	3329000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	10	3,329,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	924975000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	924,975,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18	250709500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18	250,709,500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	195000000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	195,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	24	135000000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	24	135000000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	17	84100000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	17	84100000
					Pemeliharaan Mebel	Samarinda		50	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	368230000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	368,230,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	43388000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	43,388,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7	71550000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7	71550000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	48	600000000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keetrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	48	600,000,000
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Samarinda	Jumlah Kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	25	150,000,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Samarinda	Jumlah Kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	25	150,000,000

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Samarinda	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20	400,000,000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Samarinda	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20	400,000,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Samarinda	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	14	90,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Samarinda	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	14	90,000,000
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30	300,000,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30	300,000,000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	150,000,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	150,000,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3	60,000,000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3	60,000,000
Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	20,000,000	Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	20,000,000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	900	50,000,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Samarinda	Jumlah Dokumen Izin perpanjangan IMTA	900	50,000,000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	16	80,000,000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	16	80,000,000
Perluasan Tenaga Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	22	110,000,000	Perluasan Tenaga Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	22	110,000,000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	50,000,000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	50,000,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900	150,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900	150,000,000
Job Fair/ Bursa Kerja	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	600	150,000,000	Job Fair/ Bursa Kerja	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	600	150,000,000

Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Samarinda	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	20	50,000,000	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Samarinda	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	20	50,000,000
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Samarinda	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	30	45,000,000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Samarinda	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	30	45,000,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Samarinda	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	20	30,000,000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Samarinda	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	20	30,000,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota				
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	30	100,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	30	100,000,000
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	100,000,000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	100,000,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	40	125,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	40	125,000,000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perselisihan yang dicegah	40	250,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perselisihan yang dicegah	40	250,000,000

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	40	125,000,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	40	125,000,000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kenaggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	15	55,000,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kenaggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Samarinda	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	15	55,000,000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	2	300,000,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	2	300,000,000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	70	30,000,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Samarinda	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	70	30,000,000
					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, dan EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	100,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	50,000,000
Evaluasi Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	50,000,000	Evaluasi Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	50,000,000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Walikota dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang lebih berhasil dan lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan. Dengan kata lain menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai:

1. *Idealistik* artinya suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, dan berhasil;
2. *Jangkauan* kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
3. *Abstrak*, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. *Konsisten*, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result Timeliness*).

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, Sasaran bersifat spesifik, terstruktur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda akan difokuskan pada upaya tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dan mampu mendukung terwujudnya visi dari Kota Samarinda.

Renja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2021-2026, kedua document tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi misi. Adapun visi misi Walikota Terpilih adalah sebagai berikut :

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT BERADABAN”***.

Sejalan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahun masa pembangunan Kota Samarinda adalah terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Makna yang paling besar yang terdapat dalam Visi ini adalah **Kota Samarinda sebagai Kota PUSAT PERADABAN**

Menetapkan Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda terdiri

atas aspek inti (sosial, ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (*Good Governance*, keuangan daerah) dengan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagai pondasi dalam pencapaiannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah:

1. *MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN BERBUDAYA.*
2. *MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG MAJU, MANDIRI, BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN*
3. *MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI.*
4. MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP DAN MODERN.
5. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN KOTA YANG AMAN, NYAMAN, HARMONI DAN LESTARI.

Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah:

1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 Juta per RT per Tahun)
2. Program Pengendalian Banjir dan Pembangunan Sistem Drainase Modern.
3. Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan.
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program *Smart City Plus*.
6. Program “Doctor on Call”

7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 Tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik Rt (Berbasis Kelurahan).
9. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 *playground*.
10. Program penciptaan 10.000 Wirausaha Baru (*Start Up*)

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda akan difokuskan pada upaya Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Unggul dan Berbudaya (Misi 1) serta Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan (Misi 2) dengan mengupayakan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dan mampu mendukung terwujudnya visi dari Kota Samarinda.

Oleh karena itu upaya perwujudan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam tahun 2021-2026 yang akan datang diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja.

Tujuan pertama adalah terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja merupakan penjabaran dari misi pertama Membangun daya saing tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten melalui pelatihan tenaga kerja, pemagangan dan pengembangan produktivitas. Serta misi kedua Membangun Kelembagaan Pelatihan yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Terlaksananya Program Pelatihan dan Pemagangan berbasis Kompetensi serta Pembinaan terhadap Lembaga Latihan Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Tujuan Kedua, Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja untuk mengisi kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
- Tujuan Kedua, Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan Perluasan kerja untuk mengisi kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran merupakan penjabaran dari misi ketiga Mendorong peningkatan keterampilan, kompetensi dan kemandirian Angkatan kerja dalam rangka pemenuhan lowongan kerja dan peningkatan lapangan kerja serta pengurangan pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatkan Pengetahuan Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Tujuan Ketiga, Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dan dilaksanakannya syarat kerja di perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- Tujuan Ketiga, Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dan dilaksanakannya syarat kerja di perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja merupakan penjabaran dari misi ketiga Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatkan dan penegakan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja, penyelesaian kasus-kasus PHI dan PHK antara pekerja/buruh dan perusahaan.

4. Tujuan Keempat, Terlaksananya kegiatan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program.

Tujuan Keempat, Terlaksananya kegiatan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program merupakan penjabaran dari misi kelima Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Tersedia Informasi Data yang Akurat Untuk Perencanaan Tenaga Kerja Yang Matang.

3.2. Program/Kegiatan/Sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Untuk APBD-P Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja mengalami perubahan pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabpaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Perubahan pada Sub Kegiatan ini adalah Pengurangan Anggaran dari Rp. 3.860.400.000,- menjadi 3.180.864.000,-. Perubahan pada kegiatan ini berupa penambahan dan pengurangan.

Hal tersebut dijabarkan pada table berikut :

Rekening	Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
2.07.05.2.02	Keg.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
2.07.05.2.02.0005	Sub.Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp	3.860.400.000	3.180.864.000	- 679.536.000	Berkurang
2.07.05.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp	-	75.000.000	- 75.000.000	Berkurang
2.07.05.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	Rp	-	10.710.000	- 10.710.000	Berkurang
2.07.05.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	6.060.000	5.380.000	680.000	Bertambah
2.07.05.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp	-	1.402.000	- 1.402.000	Berkurang
2.07.05.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	7.200.000	10.080.000	- 2.880.000	Berkurang
2.07.05.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi	Rp	-	100.000.000	- 100.000.000	Berkurang
2.07.05.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Rp	2.280.000.000	1.710.000.000	- 570.000.000	Berkurang
2.07.05.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	Rp	1.550.400.000	1.162.800.000	- 387.600.000	Berkurang
2.07.05.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	16.740.000	30.436.000	13.696.000	Bertambah
2.07.05.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp	-	16.500.000	16.500.000	Bertambah
2.07.05.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	Rp	-	3.000.000	3.000.000	Bertambah
2.07.05.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp	-	26.556.999	26.556.999	Bertambah
2.07.05.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/ Electric	Rp	-	29.000.000	29.000.000	Bertambah

BAB IV

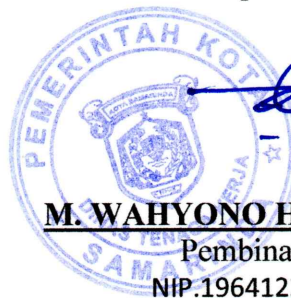
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankhir P-Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mendeskripsikan berbagai kegiatan yang direncanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran sebagai wujud nyata dari pelaksanaan program-program yang sesuai dengan Visi, Misi dan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2025. Pelaksanaan program kerja mengacu pada tuntutan paradigma baru yang harus mengedepankan kesejahteraan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Diharapkan Rancangan Akhir Perubahan Renja juga menjadi dasar yang kompeten dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemutus kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja yang optimal.

Samarinda, September 2024

Kepala Dinas



M. WAHYONO HADIPUTRO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19641224 199203 1 011